

DIPLOMASI PARLEMEN

DIPLOMASI PARLEMEN

Poltak Partogi Nainggolan

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2020

Judul:
Diplomasi Parlemen, Poltak Partogi Nainggolan

xvi + 450 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-433-935-7

Copyrights © 2020
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Oktober 2020
YOI: 1834.38.91.2020
Desain sampul: Masugeng
Foto sampul depan: Golden Rule, Norman Rockwell,
The Saturday Evening Post, April 1, 1961

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230
Telepon: +62 (0)21-31926978, 31920114
Faksimile: +62 (0)21-31924488
Email: yayasan_obor@cbn.net.id
Website: www.obor.or.id

Buku ini didedikasikan untuk alm. Erwin Indrajaya dan
Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	xii
Bab 1. Pendahuluan	1
Bab 2. Respons IPU atas Globalisasi dan Tuntutan Demokratisasi	6
I. Pendahuluan	6
II. Masalah Hak Asasi Manusia (HAM)	8
A. Eksistensi Kedaulatan Negara	8
B. Kejahatan terhadap Kemanusiaan	13
C. Perlindungan Kelompok Minoritas	18
D. Perlindungan Perempuan dan Anak	20
E. Perlindungan HAM Anggota Parlemen	25
F. Deklarasi HAM Universal	29
G. Perlunya Dialog Universal	31
III. Kampanye Demokratisasi	36
IV. Implikasi Globalisasi	45
V. Kesimpulan	54
Bab 3. Kinerja DPR dalam Diplomasi Parlemen di Era Perang Dingin	57
I. Pendahuluan	60
II. Kinerja Grup Nasional Indonesia	
III. Tantangan Grup Nasional Indonesia	72
A. Masalah Timor Timur (Timtim)	72

	B.	Pelanggaran HAM Anggota Parlemen	80
		1. Kasus Sundari Abdurahman	82
		2. Kasus Sukatno	87
		3. Kasus Sri Bintang Pamungkas	98
		4. Kasus Megawati dan Aberson	102
	IV.	Strategi Meningkatkan Peran Parlemen Indonesia	107
	V.	Kesimpulan	110
Bab 4.		Parlemen dan Masalah Timor (Timtim)	112
	I.	Keterlibatan DPR	114
	II.	Membangun Dukungan Positif	117
Bab 5.		Eksistensi dan Peran Staf Pendukung Diplomasi Parlemen	120
Bab 6.		Politik Amerika Serikat dan Posisi DPR	128
Bab 7.		Kunjungan Delegasi IMF ke DPR	137
Bab 8.		Perkembangan Politik Asia Tenggara dan Peran Parlemen	139
	I.	Ancaman Stabilitas Kawasan	139
	II.	Krisis dan Transisi Demokrasi	141
	III.	Keamanan dan Demokrasi	143
	IV.	Kontribusi Anggota Parlemen Muda	145
Bab 9.		DPR dan DPD dalam AIPO dan IPU	147
	I.	Ketidakerasian Hubungan	147
	II.	Modal dan Potensi	152
	III.	Solusi dan Kontestasi Peran	152
Bab 10		Parlemen dan Promosi Perdamaian dan Masyarakat Berkelanjutan	155
Bab 11		Diplomasi DPR di Arena Internasional	168
	I.	Panggung Bilateral	168
	II.	Panggung Multilateral	172

III.	Masalah Timor Timur (Tintim)	176
IV.	Memperjuangkan Kebebasan	178
V.	Membela Kehormatan Bangsa	183
VI.	Evaluasi Peran	185
Bab 12.	Parlemen dan Masalah Palestina, Jerusalem, Golan dan Lebanon Selatan	190
I.	Konflik Israel-Palestina dan Peran DPR	192
II.	Kompleksitas Masalah	193
III.	Respons Indonesia	194
Bab 13.	Parlemen dan Sidang Komisi Eksekutif APA di Jakarta	196
I.	Posisi DPR terhadap Statuta--Rules of Procedures	197
II.	Posisi DPR terhadap Perampangan Organisasi	199
III.	Posisi DPR terhadap Pertemuan Sub-Komisi	200
IV.	Posisi DPR atas Masalah Politik dan Keamanan	200
Bab 14.	DPR dan Sidang Sub-Komisi APA	203
I.	Harapan Ketua DPR	209
II.	Materi Delegasi Parlemen Indonesia	214
Bab 15.	Politik Luar Negeri Indonesia 2013 dan Relevansinya dengan Peran Parlemen	219
I.	Pendahuluan	219
II.	Realistiskah?	220
III.	Sikap DPR	224
IV.	Kesimpulan	225
Bab 16.	Menilai Kinerja Internasional DPR di Tahun 2013	226
I.	DPR dan PC-WTO	226
II.	SEAPAC Medan	228
III.	DPR dan MDGs	231
IV.	DPR dan DPR dan Dunia Islam	232
V.	DPR dan Permasalahan Aktual Dunia	234
VI.	DPR dan PC-WTO Bali	235

Bab 17.	Konflik Regional, Agenda Masa Depan IPU dan Peran Indonesia	237
I.	Pendahuluan	237
II.	Masalah Laut China Selatan	
III.	Kepentingan <i>Claimants</i> dan <i>Non-Claimants</i>	240
IV.	Agenda Asia Pacific Group	242
V.	Eskalasi Ketegangan di Semenanjung Korea	243
VI.	Implikasi Konflik Korea	244
VII.	Peta Kekuatan Militer	246
VIII.	Sikap Pemerintah Indonesia	247
IX.	Transisi Demokratis di Timur Tengah	148
X.	Pergantian Rezim di Timur Tengah	149
XI.	Pergantian Rezim di Mesir	252
XII.	Perang Sipil di Libya	254
XIII.	Efek Domino di Kawasan	256
XIV.	Peran Parlemen Indonesia	259
XV.	Agenda Inter-Parliamentary Union (IPU)	262
XVI.	Kesimpulan	265
Bab 18.	Peran Indonesia dalam Membangun Demokrasi Perwakilan di Myanmar: Prioritas, Proses dan Tantangan	267
Bab 19.	Masukan DPR untuk Sidang Umum IPU 16-20 Maret 2014 di Geneva-Swiss: Membangun Komitmen bagi Perdamaian dan Demokrasi	271
Bab 20.	DPR dan Hubungan Selatan-Selatan: Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC) 15-16 April 2014, Mexico City	273
Bab 21.	Posisi Delegasi DPR dalam Sidang Pleno ke-7 APA 2 Desember 2014 di Lahore-Pakistan	277
I.	Respons atas Situasi Ekonomi dan MDGs-- SDGs	282

II.	Posisi terhadap Islamabad Communique	285
III.	Posisi terhadap Lahore Declaration	287
IV.	Posisi Delegasi pada Sidang Komisi <i>Ad Hoc</i>	287
Bab 22.	Diplomasi Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Keterbatasannya	289
I.	Sejarah APA	289
II.	Kinerja Pimpinan dan Anggota APA	292
III.	Pentingnya Konferensi Lahore	293
IV.	Peran dan Posisi Indonesia	294
Bab 23.	Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Palestina sebagai Agenda Istimewa	296
I.	Dukungan Intervensi Indonesia	298
II.	Menembus Blokade Israel	299
III.	Peran Quartet serta Kaum Muda dan Perempuan	302
IV.	Pengakuan atas Negara Palestina	303
V.	Resolusi Khusus mengenai Palestina	304
Bab 24.	DPR dan Wacana Pembangunan Berkelanjutan APA	306
I.	Energi Baru dan Terbarukan	307
II.	Agenda Pengentasan Kemiskinan	308
III.	APA Merespons Perkembangan Global	309
IV.	Kepentingan Bersama Parlemen	311
V.	Energi dan Lingkungan Hidup	312
VI.	Perbaikan Kesejahteraan Penduduk	313
VII.	Keanekaragaman Budaya dan Agama	314
VIII.	Peningkatan Konektivitas	316
IX.	Peningkatan Kesejahteraan	317
Bab 25.	Posisi Indonesia di Konferensi APA	321
I.	Sidang Komisi Eksekutif	321
II.	Indonesia dan Islamabad Communique	322

III.	Indonesia dan Lahore Declaration	324
IV.	APA Melawan Embargo dan Dominasi AS	325
V.	Kekuatan Alternatif	321
VI.	Agenda Masa Depan	328
Bab 26.	APA dan Meningkatnya Instabilitas di Timur Tengah dan Afrika Utara	330
I.	APA sebagai Arena Iran	333
II.	Inkapabilitas dalam Masalah Timur Tengah	333
III.	Kegagalan dalam Mengatasi <i>Proxy War</i>	335
IV.	Mengapa Parlemen Indonesia Tetap Antusias?	336
V.	Kepentingan Negara Besar	338
Bab 27.	<i>Quo-Vadis</i> Asian Parliamentary Assembly (APA)	339
I.	Pendahuluan	344
II.	Menuju Parlemen Asia	
III.	Masalah Keorganisasian	349
IV.	Adakah <i>Common Interests</i> ?	350
V.	Bisakah Keluar dari Transisi Demokratis?	352
VI.	Kesimpulan	353
Bab 28.	Ancaman Kekerasan Sektarian Global	355
Bab 29.	Diplomasi Parlemen Indonesia-Jepang	360
I.	Diplomasi DPR dengan Ketua Diet	361
II.	Diplomasi DPR dengan Ketua Keidanren	364
III.	Diplomasi Tingkat Tinggi DPR	367
IV.	Pesan Diplomasi DPR ke Kaisar Jepang	372
V.	Diplomasi Publik DPR	374
Bab 30.	Diplomasi Parlemen Lewat Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership	377
Bab 31.	Agenda DPR dalam Diplomasi Parlemen 2019-2024	383
I.	Pendahuluan	383

II.	Parlemen dan Hubungan-Diplomasi Internasional	387
III.	Agenda Diplomasi Individual dan Bilateral	392
IV.	Agenda Diplomasi Parlemen di Arena Regional	400
V.	Agenda Diplomasi Parlemen di Panggung Multilateral	407
Bab 32.	Penutup	416
	Bibliografi	422
	Indeks	435
	Keterangan Penulis	448

KATA PENGANTAR PENULIS

Diplomasi parlemen belum banyak dikenal dan terpublikasi secara luas di masyarakat, termasuk di kalangan peminat studi hubungan internasional hingga dewasa ini. Bahkan, di kalangan mereka yang meniti karir di dunia diplomasi secara formal selama ini, yakni Kementerian Luar Negeri. Mereka juga masih canggung mengakui secara terbuka dan belum terbiasa menggunakan terminologi “diplomasi parlemen,” sebagai bagian dari aktivitas diplomasi yang berlangsung selama ini, secara resmi maupun tidak resmi, yang dipertunjukkan di meja-meja perundingan maupun di luar itu. Dengan kata lain, diplomat di negeri berkembang tampaknya belum (dapat) mengakui secara jujur peran dan kegiatan anggota parlemen (DPR) yang turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan nasional setiap negara dalam aktivitas hubungan internasional pada umumnya, yang turut berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan dan upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan dunia sejak dulu hingga dewasa ini.

Di negara-negara yang telah maju secara ekonomi dan praktik demokrasinya, diplomasi parlemen telah seabad lebih lamanya dipraktikkan, dengan hasilnya yang tampak di sana-sini. Praktik diplomasi parlemen sejalan dengan pertumbuhan demokrasi di negara maju, yang mengedepankan peran para wakil rakyat, bukan hanya mengandalkan pemerintah, dalam pencapaian kepentingan nasional di dunia hubungan internasional. Dengan demikian perkembangan diplomasi parlemen mencerminkan pula perkembangan kualitas demokrasi yang berlangsung di negara-negara Eropa Barat, yang

dominan dengan adopsi sistem parlementernya dan implementasi sistem dua kamar (bikameral) di parlemen mereka masing-masing.

Tidak mudah untuk mengakui capaian praktik diplomasi parlemen yang telah dipraktikkan setiap negara, terutama oleh Prancis, yang sejak tahun 1887 telah berusaha mengimplementasikannya secara optimal dengan menginisiasi pendirian Uni Parlemen Sedunia (*Inter-Parliamentary Union*–IPU). Ini logis, karena pemerintah masih diakui sebagai satu-satunya aktor atau pelaku formal dan sah kegiatan diplomasi internasional. Sementara, parlemen sampai seabad lebih berjalan masih dilihat sebagai penggembira atau pemain cadangan atau tambahan yang hanya berperan di lapangan pinggir, tidak mengarahkan dan dapat menentukan hasil (akhir) permainan dunia diplomasi.

Waktu berjalan terus, dan permasalahan dunia semakin kompleks. Demikian juga dengan eksistensi para pelaku diplomasinya. Pemain baru bermunculan, apakah itu diminta maupun tidak, karena kebutuhan yang mulai muncul ataupun mendesak dengan munculnya tuntutan otomatis dari dunia diplomasi dan negara-negara yang melakukannya. Para anggota parlemen asal Indonesia, yang bernaung di bawah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan contoh dari aktor-aktor diplomasi yang muncul kemudian.

Di kalangan akademisi dan publik yang cerdas, terdapat penilaian sendiri mengenai apa dan bagaimana kategori diplomat yang dapat menjalankan praktik diplomasi ini secara tepat dan efektif, terutama dewasa ini. Dapat dipahami, penilaian yang pro-kontra muncul akibat maraknya kegiatan studi banding anggota DPR yang mengatasnamakan diplomasi parlemen, sehingga merancukan maknanya dan kemudian merendahkan signifikasinya. Terlepas dari situasi ini, sesungguhnya praktik diplomasi parlemen telah dimainkan oleh para anggota DPR sejak beberapa dasawarsa lalu, seiring dengan munculnya kebutuhan pemerintah yang sadar atas keterbatasannya, dan munculnya kemampuan negara untuk membiayainya ketika

kemakmuran tumbuh di awal pemerintahan Orde Baru, yang secara keras telah memacu pertumbuhan ekonomi, dengan dilindungi praktik otoriterisme politiknya.

Meningkatnya pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) dan kebutuhan akan kapital yang terus meningkat, membuat pemerintah membutuhkan aktor dari parlemen sebagai pemain lain dunia diplomasi yang dapat melindungi dan membantu memperkuat posisi Indonesia di berbagai meja perundingan internasional dari berbagai kecaman dan tekanan yang dapat menyudutkan Indonesia. Eksistensi dan peran anggota parlemen kemudian secara realistis dapat dirasakan manfaatnya oleh negara, lebih tepat lagi, pemerintah, sebagai agen yang mengelolanya untuk setiap periode tertentu, sekalipun juga secara simultan turut memberi tekanan yang menyesakkan dari dalam, akibat sikapnya dalam berbagai resolusi yang mengkritik dan menyudutkan Indonesia. Memang, penilaian mengenai hasil diplomasi parlemen itu sendiri pada akhirnya harus dapat dilihat dari perspektif yang cermat, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dilihat bagi kepentingan nasional dan dunia, untuk kemaslahatan umat manusia di manapun mereka berada, terutama di kalangan negara-negara anggota IPU.

Jakarta, akhir Maret 2020
Poltak Partogi Nainggolan

BIBLIOGRAFI

Buku

- Assad, Muhammad Haidar. 2014. *ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*. Jakarta: Zahira.
- Badri, Jusuf . 1994. *Kiat Diplomasi: Mekanisme dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Barston, R.P. 1988. *Modern Diplomacy*. UK: Longman.
- Beetham, David. 2006. *Parliament and Democracy in the Twenty-First Century*, Geneve: IPU.
- Berridge, G.R. 1995. *Diplomacy: Theory and Practice*. New York: Prentice-Hall.
- Carey, Peter dan G. carter Bentley .1995. *East Timor at the Crossroads: the Forging of A Nation*. New York: Social Science Research Council.
- Diplomasi DPR: Dari Senayan ke Kancah Global*. 2009. Jakarta: BKSAP.
- Diplomacy through Parliament: the Role of DPR in the International Arena*. 1995. The Committee for InterParliamentary Co-operation of Secretariat General of DPR, Jakarta, Indonesia.
- Haryanto, Agus dan Isman Pasha. 2016. *Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Honary, Ehsan. 2007. *Total Diplomacy: The Art of Winning Risk*, BookSurge Publishing.
- IPU Secretariat. 1992. *Follow-Up to the Inter-Parliamentary Council's Resolutions on the Human Rights of Parliamentarians*, April 24, p. 1-3.
- Katharina, Riris. 2019. *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Linz, Juan J. and Alfred Stepan. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore and London: the Johns Hopkins University Press.
- Lister, Charles R. 2015. *The Syrian Jihad*. Oxford: Oxford University Press.
- Mabon, Simon. 2016. *Saudi Arabia and Iran: Power and Rivalry in the Middle East*. London and New York: IB Tauris.
- Monitoring and Investigating the Security Sector*. 2006. Geneve: UNDP & DCAF.
- Muchdor, Mustofa. 2006. *Bikameral Bukan Federal*, Jakarta: DPD.

- Nainggolan, Poltak Partogi. 2000. *Kinerja DPR dalam Inter-Parliamentary Union*. Jakarta: P3I, DPR.
- _____. 2001. "Parlemen Indonesia dalam Lintasan Sejarah," *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: API Foundation
- Nainggolan, Poltak Partogi *et al.* 2013. *AIPA dan Realisasi Komunitas ASEAN 2015*, Jakarta: BKSAP.
- _____. *Diplomasi Parlemen di Asia Tenggara: Spektrum Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly 2011-2012*. Jakarta: BKSAP.
- _____. 2011. *Inter-Parliamentary Union dan Agenda Global Abad 21*. Jakarta: P3I Sekretariat Jenderal DPR.
- _____. 2005. *TKI dan Hubungan Indonesia dan Malaysia*. Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR.
- _____. 2004. *Konflik-konflik Regional Pasca-Perang Dingin*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR.
- _____. 2003. *Twenty Five Years ASEAN Inter-Parliamentary Organization*. Jakarta: AIPO Secretariat General.
- _____. 2000. *Respons IPU Terhadap Masalah-masalah Global Pasca-Perang Dingin*. Jakarta: P3I Sekretariat Jenderal DPR, 2000.
- _____. 2001. *Politik Luar Negeri Indonesia Masa Abdurrachman Wahid*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR, 2001.
- _____. 1997. *AIPO 20 Years: ASEAN Inter-Parliamentary Organization*. Jakarta: Setjen DPR, 1997.
- _____. 1996. *ASEAN dan AIPA dalam Kawasan yang Berubah*. Jakarta: P3I Sekretariat Jenderal DPR.
- Nainggolan, Poltak Partogi and Riris Katharina. 2008. *Strengthening the Management of the Parliamentary Party Groups in the House of Representatives of the Republic of Indonesia*. Jakarta: UNDP.
- O'Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead. (Eds.). 1986. *Transitions from Authoritarian Rules: Prospects for Democracy*, Volume 4. Baltimore and London: the Johns Hopkins University Press.
- _____. 1986. *Transitions from Authoritarian Rules: Comparative Perspectives*, Volume 5. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Newsom, David D. 1996. *Dimensi Publik Politik Luar Negeri*. (terj.) *Public Dimension of Foreign Politics*. Bandung: Angkasa.
- Nicholson, Harold. 1969. *Diplomacy*. Oxford: Oxford University Press..

- Nicholson, Michael. 1998. *International Relations*. London: Macmillan Press.
- Numelin, Ragnar. 1950. *The Beginnings of Diplomacy: A Sociological Study of Intertribal and International Relations*. London: Oxford.
- Papp, Daniel S. 1997. *Contemporary International Relations: Framework for Understanding*. Macmillan.
- Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, mechanism, and practices*. 2003. Geneve: IPU & DCAF.
- Selayang Pandang Inter-Parliamentary Union (JPU)*. 1999. Sekretariat Jenderal DPR, Jakarta, Indonesia.
- Sekretariat Jenderal DPRRI. 1992a. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987-1992*, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal DPR. 1992. *Suplemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987-1992*, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal DPRRI .1997. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1992-1997*, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal DPRRI. 1999. "Inventarisasi Kegiatan BKSAP Periode 1997-1999," dalam *Lampiran Memori Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Bakti Tahun 1997-1999*, Jakarta.
- Roy, S.L. 1991. *Diplomasi*. (terj.) *Diplomacy*. Jakarta: Rajawali.
- Singh, Bilveer. 1998. *Timor- Timur, Indonesia dan Dunia*, EdisiRevisi, Jakarta: IPS.
- S. Nuraeini, Deasy Silvy, dan Arfin Sudirman. 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Steab, Jill and Llyod Pettiford. 2001. *International Relations: Perspectives and Themes*. England: Pearson Education Ltd..
- Stern, Jessica and J.M. Berger. 2015. *ISIS: The State of Terror*. Ecco; Wiliam and Collins.
- Tim Peneliti Hubungan Internasional P3I. 2000. *Respons IPU terhadap Masalah-masalah Global Pasca-Perang Dingin*. Jakarta: DPR.
- Wight, Martin. 1991. *International Theiry: The Three Traditions*. Edited by Gabrielle Wight and Brian Porter. Kent.

Jurnal-Majalah

- "Delegasi DPR Berperan Aktif dalam Perumusan Draft APA, 2016, " *Parlementaria*, edisi 138, Th. XLVI: 66
- "Demokrasi Menjawab Tantangan, 2016, " *Parlementaria*, edisi 138, Th. XLVI: 67.

- Huntington, Samuel P., 1993, "The Clash of Civilisations", *Foreign Affairs*, Summer: 22-49.
- Nainggolan, Poltak Partogi, 2012, "Tantangan Menuju Komunitas ASEAN 2015." *Analisis*, CSIS, Vol. 41, No. 3, September.
- _____, 2012, "Parlemen dan Milenium Baru." *Parlementaria*, Th XLII.
- _____, 2007, "Menuju Pembentukan Parlemen ASEAN." *Analisis*, CSIS, Vol. 36, No. 4, Desember.
- _____, 2007, "Parlemen dan Isu Jender." *Jurnal Kajian*, Vol. 12, No. 1, Maret, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR.
- Samuelson Robert J., 1999-2000, "The Future of Freedom," *Newsweek*, December 27-January 3: 70-71.
- Shawcross, William, 1999-2000, "The Deadly Sin of Staying Neutral," *Newsweek*, December 27-January 3: 19.

Makalah

- Alhadar, Smith. 2014. "Isu Kontemporer Indonesia, ISIS (Suriah dan Irak), Palestina, Jerusalem, dan Irak," makalah FGD di BKSAP-DPR, 26 November.
- _____. 2014. "Prospek Perdamaian Israel-Palestina," makalah FGD di BKSAP-DPR, 26 November.
- Alter, Jonathan. 1999-2000. "From the Prison of the 'Isms,' *Newsweek*, December 27-January 3, p. 33.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2013. "Parlemen dan Hubungan Internasional: Diplomasi DPR di Fora Internasional," makalah Orasi Profesor Riset. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR-LIPI.
- _____. 2012. "The Role of Plenary Meeting," makalah presentasi untuk *The Third International Seminar for Parliamentary Research Services in Asia*, National Assembly Research Service (NARS), Seoul, South Korea.
- _____. 2011. "DPR's Supporting System and Indonesia's Democratic Consolidation," makalah dipresentasikan dalam *The Second International Seminar for Parliamentary Research Services in Asia*. National Assembly Research Service (NARS), Seoul, South Korea
- _____. 2009. "An ASEAN Parliament in the Region?" makalah untuk diskusi the Association of Southeast Asia Students of the Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, di the Arnold Berg-straesser Institut (ABI), Freiburg, tidak diterbitkan.
- Sony Harsono. 2018. "Makalah Presentasi Dirjen Otda Kemendagri," di DPR pada 11 Desember.

Suratkabar

- Alhadar, Smith. 2015. "ISIS, Palestina, dan Yaman," *Koran Tempo*, 2 April: 14.
- Anggriawan, Fiddy. 2012. "Naif Anggota DPR ke Venezuela Bahas RUU Desa." *Okezone*, 22 Juni, <http://www.jakarta.okezone.com/read/2012/06/22339/652030/naif-anggota-dpr-ke-venezuela-bahas-ruu-desa>, diakses 20 Juli 2013.
- Azra, Azyumardi. 2016. "Rivalitas Saudi-Iran (1)," *Republika*, 23 Juni: 9.
- _____. 2016. "Rivalitas Saudi-Iran (2)," *Republika*, 30 Juni: 9.
- "Baghdad Jadi Ladang Kematian," *Kompas*, 4 Juli 2016: 1.
- Barnard, Anne. 2016. "Saudis cut billions in aid to Lebanon," *The International New York Times*, March 4: 6.
- "Besok Komisi I DPR Masuk Gaza." *Hidayatullah.com*, 4 Desember 2012.
- Cahyafitri, Raras and Rendi A. Witular. 2016. "Iran takes on Saudis in RI." *The Jakarta Post*, February 22: 1.
- "Cina Menentang Pembentukan Pengadilan Internasional Timtim," *Kompas*, 2 Februari 2000: 2.
- "Clinton Desak Senat Setujui Larangan Anak-anak Jadi Tentara," *Suara Pembaruan*, 22 Januari 2000: 5.
- Croisette, Barbara. 2000. "Mandela Calls for United Action in Burundi," *International Herald Tribune*, January 21: 6.
- "DPR Minta Myanmar Jadikan Muslim Rohingya Warga Negara." *Tribunnews.com*, 2 Agustus 2012, diakses pada 4 Desember 2012.
- "Efek Domino Revolusi di Mesir, Aktivis Perbincangkan Jadwal Revolusi Susulan," *Pikiran Rakyat*, 1 Februari 2011.
- "Even Chaebol Have Right", *The Asian Wall Street Journal*, February 15, 2000: 14.
- Fitch, Asa and Margherita Stancati. 2016. "Saudi's Efforts to Isolate Iran Face Resistance," *The Wall Street Journal*, January 20, p. A3.
- Hendardi. 2000. "Kejahatan terhadap Kemanusiaan," *Suara Pembaruan*, 27 Januari: 8.
- "Iran-Bahrain Memanas soal Status Ulama Syiah," *Kompas*, 22 Juni 2016: 9.
- "Iran Peringatkan Saudi Atas Pengerahan Pasukan di Suriah," *Harian Pelita*, 18 Februari 2016: 15.
- "Kasus Austria, Kedaulatan Nasional, dan Soal Tekanan Internasional," *Kompas*, 3 Februari 2000: 4.
- Katharina, Riris dan Poltak Partogi Nainggolan. 2005. "Tentang Staf Ahli dan Staf Pribadi di DPR." *Sinar Harapan*, 17 Juni.
- "Kekerasan terhadap Perempuan, Pelanggaran HAM," *Kompas*, 4 Januari 2000: 9.

- "Konflik Korea Tekan Rupiah," *Kompas*, 25 November 2010.
- Kostermans, Dyan. 2011. "Peran Internet dalam Revolusi di Mesir," *DPA, DW*, 14 Februari.
- Levin, Ned and Margaret Coker. 2016. "Turkey Lawmakers Cede Powers to Leader," *The Wall Street Journal*, July 22-24.
- "Laut Kunci Diplomasi Ekonomi RI," *Koran Nasional*, 24 Oktober 2019: A10.
- Luberto, Lutfi. 2011. "Tuntutan Revolusi di Mesir," *RRI*, 27 Januari.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2016. "Bom dan Masa Depan Peradaban Islam." *Kompas*, 5 Juli:1 & 15.
- Manan, Abdul. 2015. "'Konflik Wilayah' di Timur Tengah," *Koran Tempo*, 7 April: 29.
- Marsudi, Retno LP. 2016. "Indonesia's message of peace for the Middle East," *The Jakarta Post*, January 25: 6.
- "Mencermati Model Globalisasi Versi Pertemuan Davos," *Kompas*, 2 Februari 2000: 4.
- "Menkeu: Dampak Konflik Korea hanya Sementara," *Tribunnews.com*, 24 November, 2010.
- Meryani, Andina. 2010. "Konflik Korea Bisa Pengaruhi Ekspor RI," 26 November, Okezone, <http://economy.okezone.com/read/2010/11/26/320/397397/konflikkorea-bisa-pengaruhi-ekspor-ri>, diakses pada 26 November 2010.
- "Militer Fiji Akan Lanjutkan Kekuasaan Selama Dua Tahun," *Media Indonesia*, 27 Juni 2000: 1.
- Militer Fiji Tolak Libatkan Speight dalam Pemerintahan," *Media Indonesia*, 29 Juni 2000: 27.
- Mungoven, Rory. 2000. "Saving Child Soldiers," *The Asian Wall Street Journal*, February 11-12: 6.
- "Myanmar Minta Indonesia Membangun Shelter," *Kompas*, 9 Januari 2013: 10.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2012. "Parlemen dan Perdagangan Internasional." *Jurnal Nasional*, 17 Desember 2012: 6.
- _____. 2008. "Asian Parliamentary Assembly dan Koalisi Anti-AS." *Jurnal Nasional*, 17 Desember.
- _____. 2007. "Matinya Hati Nurani (Wakil) Rakyat." *Media Indonesia*, 13 September.
- _____. 2007. "Parlemen ASEAN, Mungkinkah Terwujud?" *Sinar Harapan*, 25 Agustus.
- _____. 2007. "Mempertanyakan Urgensi Konferensi IPU di Bali." *Media Indonesia*, 30 April.
- _____. 2005. "Parlemen dan Take Home Pay." *Media Indonesia*, 26 Oktober.

- _____. 2005. "Jalan Panjang Menuju Parlemen ASEAN." *Sinar Harapan*, 6 Agustus.
- _____. 2005. "DPD ke Fora Internasional." *Koran Tempo*, Juni 10.
- "Pakta Dagang RCEP akan Hadir di 2020," *Media Indonesia*, 6 November 2019: 2.
- "Parlemen Indonesia Pertama ke Palestina Pasca-Putusan PBB." *Berita Satu.com*, 3 Desember 2012, diakses pada 5 Desember 2012.
- "PBB-AS Ditekan Cabut Sanksi Ekonomi pada Irak," 2000, *Kompas*, 17 Februari: 3.
- Peker, Emre. 2016. "Erdogan Turns Against Once Useful Islamist Ally," *The Wall Street Journal*, July 22-24: A3.
- "Pembantai Rwanda Dihukum," *Kompas*, 28 Januari: 24.
- "Pembunuhan Anggota DPR di Medan Diduga Berbau Politik," 2000, *Suara Pembaruan*, 2 Februari: 2.
- "Peran Besar Indonesia Dinanti," *Kompas*, 3 Juni 2016: 2.
- "Perjuangan Panjang Suku Karen," *Kompas*, 27 Januari 2000: 1.
- "Perlu Aliansi Strategis Indonesia-Cina-India untuk Hadapi Pemaksaan Barat," 2000, *Kompas*, 28 Januari: 11.
- "Permintaan SBY pada Assad," *Kompas*, 9 Januari 2013: 6.
- Pomfret, John. 2000. "Ethnic Unrest Continuing In Cina, Despite Crackdown," *International Herald Tribune*, January 28: 4.
- "Presiden Abdurrahman Wahid: Harus Diantisipasi Penggunaan Agama untuk Kekerasan," *Kompas*, 16 Juni 2000: 6.
- "Presiden Jokowi Dorong Kolaborasi Indo-Pasifik," *Koran Jakarta*, 4 November 2019: 1.
- "Presiden Tiba di Jenewa, Bertemu Soros," 2000, *Media Indonesia*, 31 Januari: 1.
- Priatna, PLE. 2016. "Jokowi dan Terobosan Diplomasi RI." *Kompas*, 27 Januari: 7.
- Rahal, Layal Abou. 2016. "Lebanon pays the price in Iran-Saudi feud," *The Jakarta Post*, March 4: 11.
- "RI Siap Berkontribusi Pulihkan Hubungan Iran-Arab," *Koran Jakarta*, 8 Maret 2016: 8.
- Sanger, David E. 2016. "A year later, Iran nuclear accord has mixed record," *International New York Times*, July 15: 1 & 5.
- Santi, Natalia. 2016. "Memperebutkan Yaman," *Koran Tempo*, 12 Februari: 25.
- "Sengketa Laut Cina Selatan, Filipina Umumkan Nama Baru, Vietnam Susun Strategi Perang" *Batam Pos Online*, <http://www.batampos.co.id/>

- index.php/2011/06/15/sengketa-laut-Cina-se-latan-filipina-umumkan-nama-baru-Viet-Nam-susun-strategi-perang*, diakses 12 Juli 2011.
- "Sentimen Konflik Korea Tekan Indeks BEI," *Antara News*, 26 November 2010.
- Septiari, Dian. 2019. "RCEP not Cina-led initiative: ASEAN Secretary General," *The Jakarta Post*, November 8: 2.
- Sirry, Mun'im. 2015. "Sunni-Shiite tensions and our culture of tolerance," *The Jakarta Post*, December 4: 6.
- Solarz, Stephen, David Aronson and Stephen Weissman. 2000. "Genocide in Rwanda While Washington Dithered," *International Herald Tribune*, February 21, 2000: 10.
- Steinfels, Peter. 2000. "President: A Leader Who Stand Out in A Violent World," *International Herald Tribune*, June 19: 7.
- Stephens, Bret. 2016. "Truth Catches Up To the Iran Deal," *The Wall Street Journal*, July 18: A10.
- Pribadi Sutiono. 2000. "Milenium Baru: Antara Konflik atau Dialog," *Suara Pembaruan*, 26 Januari: 9.
- "Tidak Ada Luka Tembak di Tubuh Korban: Kapolri Perintahkan Usut Kematian Anggota DPR," *Media Indonesia*, 2 Februari 2000: 2.
- "Timur Tengah, Kawasan Paling Berbahaya," *Kompas*, 29 Februari 2016: 10.
- Trofimov, Yaroslav. 2016. "Saudi See Time on Their Side in Yemen War," *The Wall Street Journal*, July 22-24: A2.
- _____. 2016. "Feuding Friends Frustrate Saudi Efforts on Iran," *The Wall Street Journal*, Juli 1-3: A2.

Portal

- A.L., Hadi dan Yayan Sopyani. 2011. "Inilah Pemicu Revolusi Mesir," *Rakyat Merdeka*, 31 Januari.
- _____. 2011. "Husni Mubarak, Pemimpin Militer yang Digoyang Kekuatan Sipil," 31 Januari.
- Anggriawan, Fiddy. "Naif Anggota DPR ke Venezuela Bahas RUU Desa." *Okezone*, 22 Juni 2012, http://www.jakarta.okezone.com/read/2012/06/22339/6520_30/naif-anggota-dpr-ke-venezu-ela-bahas-ruu-desa, diakses 20 Juli 2013.
- "AS pro Manila terkait Laut Cina Selatan," 24 Juni 2011, *Vive News.com*, diakses pada 12 Juli 2011.
- "Besok Komisi I DPR Masuk Gaza." *Hidayatullah.com*, 4 Desember 2012.
- Dessy Sagita. 2013. "Menlu: 2013, Prioritaskan Perlindungan WNI di Luar Negeri," *Suara Pembaruan*, Jakarta Globe, 4 Januari 2013, diakses pada 8 Januari.

- “DPR Memulai Kembali Diplomasi Parlemen,” [http://dpr.go.id/berita/detail/id/26154/t/ DPR +Memulai+Kembali+Diplomasi+Parlemen](http://dpr.go.id/berita/detail/id/26154/t/DPR+Memulai+Kembali+Diplomasi+Parlemen), 16 Oktober 2019, diakses pada 17 Oktober 2019.
- “DPR Minta Myanmar Jadikan Muslim Rohingya Warga Negara.” *Tribunnews.com*, 2 Agustus 2012, diakses pada 4 Desember 2012.
- “DPR Soroti Defisit RAPBN 2020 Capai Rp 307, 2 triliun,” *Liputan 6.com*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4070637/defisit-apbn-agustus-2019-capai-rp-199-triliun>, diakses pada 9 Oktober 2019.
- “Filipina akan Ajukan Sengketa Laut Cina Selatan ke Mahkamah PBB,” 11 Juli 2011, <http://www.voanews.com/indonesian/news/Filipina-akan-Ajukan-Sengketa-Laut-Cina-Selatan-ke-PBB-125354228.html>, diakses 12 Juli 2011.
- “Foreign Relations: Total Diplomacy, *Time*, March 13, 1950, <http://content.time.com-/time-/magazine/article/0,9171,812120,00.html>, diakses pada 31 Oktober 2019.
- Fox, William T. R. 1951. “The United Nations in the Era of Total Diplomacy,” *International Organization*, Vol. 5, No. 2 (May), Wisconsin: University of Wisconsin Press, <http://www.jstor.org/stable/2703825>, pp. 265-273.
- Fox, William T. R. 1951 “The United Nations in the Era of Total Diplomacy,” *International Organization*, Vol. 5, No. 2 (May), DOI: <https://doi.org/10.1017/S002-0818300015319>, Cambridge University Press: 22 May 2009, diakses pada 31 Oktober 2019.
- Hasil-hasil Sidang Umum ke-116 IPU dan Sidang-sidang terkaitnya di Bali, Indonesia, pada 29 April-4 Mei 2007, di IPU website: <http://www.ipu.org/con-e/116/1Cmt.conf.pdf>, diakses pada 18 Juli 2012.
- “Help Gus Dur by Seeing the Benefits of Tolerance,” 2000, *International Herald Tribune*, January 28, <http://www.indopubs.com/archives/0216.html>: 1-3.
- “Ini Refleksi dan Proyeksi Politik Luar Negeri Indonesia,” 28 Desember 2012, *Republika.co.id*, diakses pada 8 Januari 2012.
- “International Humanitarian Law, International Criminal Court and Anti-Personnel Mines,” January 14, 2000, <http://www.ipu.org/cnl-e163-hlaw.htm>: 1-2.
- “IPU and Human Rights: Human Rights and Humanitarian Laws,” (2000), <http://www.ipu.orglist-e/hr-law.htm>, January 14, p. 1-2.
- “IPU Strategic Agenda 2012-2017,” Inter-Parliamentary Union, <http://www.ipu.org/english/home.htm>, diakses pada 27 Juli 2011.

- Kai He. 2009. "Dynamic Balancing: Cina's balancing strategies towards the United States, 1949-2005," *Journal of Contemporary Cina*, 18:58, 113-136, DOI: 10.1080/10670560802431701, diakses pada 10 Oktober 2019.
- "Kapal pemantau Cina terlihat di perairan Laut Cina Selatan dekat Viet Nam," BBCOnline, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/06/110610_Viet_Namplan.shtml, diakses 12 Juli 2011.
- Kawilarang, Renne R.A. "Laut Cina Selatan Picu Konflik Cina-Viet Nam," *Vivanews.com*, 10 Juni 2011, http://dunia.vivanews.com/news/read/225832-Cina-Viet_Nam-bersitegang-di-wilayah-sengketa, diakses 12 Juli 2011.
- _____. 2011. "Giliran Pemimpin Libya Digoyang Demonstrasi," 16 Februari.
- Kawilarang, Renne R.A dan Denny Armandhan. 2011. "Demonstrasi Anti Ghadafi, Belasan Tewas," 18 Februari.
- "Komisi I DPR Tembus Jalur Gaza." *Media Indonesia*, 30 Juni 2010, http://gresnews.com/ch/TopStories/cl/Palestina/id/1273741/Komisi+I+DPR_TembusJalur+Gaza, diakses pada 20 Juli 2012.
- "Laut Cina Selatan Penting Bagi ASEAN," 30 Mei 2011, Hukum Online.com, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4de3a765c4e3c/laut-Cina-selatan-penting-bagi-asean>, diakses pada 12 Juli 2011.
- Mapendere, Jeffrey. "Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks," Conflict Resolution Program Carter Center, COPOJ-*Culture of Peace Online Journal*, 2 (1), https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/TrackOneandaHalfDiplomacy_Mapendere.pdf: 66-81.
- McDonald, John W. 2003 "Multi-Track Diplomacy," Guy Burgess and Heidi Burgess (Eds.), dalam *Beyond Intractability*, Conflict Information Consortium, University of Colorado, Boulder, September 2003, <http://www.beyondintractability.org/essay/multi-track-diplomacy>, diakses pada 31 Oktober 2019.
- "Menlu: Politik Luar Negeri Indonesia Jelas dan Nyata," *TribuneNews.com*, 4 Januari 2013, diakses pada 8 Januari 2013.
- Mitra Tarigan. 2013. "9 Refleksi Kementerian Luar Negeri," *Tempo.co.*, 4 Januari 2013, diakses pada 8 Januari.
- "Myanmar Minta Indonesia Membangun Shelter," *Kompas*, 9 Januari 2013: 10.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2006. "Studi Banding, Masih Perlukah?" 15 November, *Parlemen.net*, Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia.
- _____. 2005. "Rasionalkah Keinginan DPR Menaikkan Gaji?" *Parlemen.net*, Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia, PSHK, 22 Maret.

- "Parlemen Indonesia Pertama ke Palestina Pasca Putusan PBB." Berita Satu.com, 3 Desember 2012, diakses pada 5 Desember 2012.
- "Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara," Global Future Institute, http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=345&type=8.
- "Perlu Campur Tangan Dunia untuk Penyelesaian Perang Saudara di Kongo" (2000), *Kompas*, 19 Februari, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0002/OPI-NI/taju.4.1:3-5>.
- Peters, Ralph. 2000. "Sometimes It Takes a Child to Raze a Village," *The Asian Wall Street Journal*, February 1, p. 6.
- "Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia," RM Marty M. Natalegawa, Tahun 2013," Kemenlu RI, 4 Januari 2013, Kemlu.go.id, diakses pada 8 Januari 2013.
- "Promoting Respect for International Humanitarian Law," January 14, 2000, <http://www.ipu.org--cnl-e--157-hlaw.htm>: 1-2.
- "RI-Malaysia Sepakat merujuk UNCLOS." *Republika online*, 10 Maret 2010. Osdir. com, <http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia>, diakses pada 20 Desember 2012.
- Saputra, Eka. 2011. "Calon Presiden IPU Indonesia: Didukung Negara Lain, Ditolak Negara Sendiri." *Kontan Online*, 31 Oktober, <http://www.nasional.kontan.co.id/news/calon-presiden-ipu-indonesia-didukung-negara-lain-ditolak-negara-sendiri>, diakses pada 25 Juli 2013.
- Sidik, Jafar M. 2008. "Dewi Fortuna Puji Kebijakan Diplomasi Publik Deplu," *Antara News*, 6 September, diakses pada 8 Januari 2013.
- Staats, Jennifer, Johnny Walsh and Rosarie Tucci. 2019. "A Primer on Multi-track Diplomacy: How Does it Work?" <https://www.usip.org/publications/2019/07/pri-mer-multi-track-diplomacy-how-does-it-work>, July 31, diakses pada 31 Oktober 2019.
- "Studi Banding Anggota DPR Seharusnya Sangat Selektif." *Republika Online*, 18 September 2010, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/0/18/135297-studi-banding-anggota-dpr-seharusnya-sangat-selektif>, diakses pada 20 Juli 2013.
- Sutrisno, Elvan Dany. 2012. "Fitra: DPR Tak Tahu Malu Pelesiran ke Luar Negeri," *Detik. Detik.News*, 20 Juni, <http://www.news.detik.com/2012/06/20/1237-03/1946033/10/fitra-dpr-tak-tahu-malu-pelesiran-ke-luar-negeri>, diakses 20 Juli 2013.
- "TNI Watch, Kriteria Penjahat Perang," <http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siar-list/msg043-79.html>: 1-2.

- Toriq, Ahmad. 2012. "Ini Curhat Warga Rohingya pada Hidayat Nur Wahid." *Detik.news*, diakses pada 4 Desember.
- Utomo, Aris Heru. 2012. "Politik Luar Negeri RI Sekarang Lebih Percaya Diri," *Republika.co.id*, 19 September, diakses pada 8 Januari 2013.
- Wedhaswary, Inggried Dewi. 2010. "DPR Bantah Jalan-jalan di Luar Negeri." *Kompas.com*, 23 Oktober, <http://www.nasional.kompas.com/read/2010/10/23/11-073329/DPR.Bantah.Jalan.jalan.di.LuarNegeri>, akses 20 Juli 2013.
- "What is IPU," <http://www.ipu.org/english/whatipu.htm>: 1, diakses 14 Januari 2000.

Dokumen

- Results of 95th Conference and Related Meetings*, Istanbul, Turkey, 12-20 April 1996.
- Results of 1989 March Session of the Inter Parliamentary Union*, Budapest, Hungary, 10-18 March 1989, Geneve: IPU Secretariat.
- Results of 1989 September Session of the Inter Parliamentary Union*, London, United Kingdom, 1-9 September 1989, Geneve: IPU Secretariat.
- Results of 1991 April-May Session of the Inter-Parliamentary Union*, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea, 26 April-4 May 1991, Geneve: IPU Secretariat.
- Results of 1991 October Session of the Inter-Parliamentary Union*, Santiago, Chile, 4-12 October 1991, Geneve: IPU Secretariat.
- Results of 1992 April Session of the Inter-Parliamentary Union*, Yaounde, Cameroon, 3-11 April 1992, Geneve: IPU Secretariat.
- Results of 1992 September Session of the Inter-Parliamentary Union*, Stockholm, Sweden, 4-12 September 1992, Geneve: IPU Secretariat.
- Results of April 1993 Session*, New Delhi, India, 9-17 April 1993, Geneve: IPU Secretariat.
- Results of March 1994 Session*, Paris, France, 18-26 March 1994, Geneve: IPU Secretariat.
- Results of 1994 September Session of the Inter-Parliamentary Union*, Copenhagen, Denmark, 9-17 September 1994, Geneve: IPU Secretariat.
- Results of 93rd Conference and Related Meetings*, Madrid, Spain, 24 March-1 April 1995, Geneve: IPU Secretariat.
- Results of 94th Conference and Related Meetings*, Bucharest, Romania, 6-14 October 1995, Geneve: IPU Secretariat.
- Results of 95th Conference and Related Meetings*, Istanbul, Turkey, 12-20 April 1996, Geneve: IPU Secretariat.

Results of 96th Conference and Related Meetings, Beijing, Cina, 13-21 September 1996, Geneve: IPU Secretariat.

Results of 97th Conference and Related Meetings, Seoul, Republic of Korea, 7-15 April 1997, Geneve: IPU Secretariat.

Results of 98th Conference and Related Meetings, Cairo, Egypt, 7-16 September 1997, Geneve: IPU Secretariat.

Results of 99th Conference and Related Meetings, Windhoek, Namibia, 2-11 April 1998, Geneve: IPU Secretariat.

Results of 100th Conference and Related Meetings, Moscow, Russian Federation 6-12 September 1998.

Results of 101th Conference and Related Meetings, Brussels, Belgium, 8-16 April 1999.

Results of 102th Conference and Related Meetings, Berlin, Germany, 10-16 October 1999.

INDEKS

- Aaron Ward Mannes, 131
Abdillah Toha, 174, 179, 197
Abdul Gafur, 184
Abdurrahman Wahid, 34, 128
Aberson Marle Sihalofo, 26, 27, 59,
82, 102, 104, 105, 178
ABRI, 104, 113, 114
Aceh, 26, 27, 31, 128, 129, 140, 161,
373
Ad Hoc, 61, 151, 287
AD/ART, 153, 173
Addis Ababa, 179
Additional Protocols, 29
Adidaya, 6, 8, 79, 140, 234, 239, 241
Advisor, 153
advisors, 111, 153
affirmative action, 263, 264
Afghanistan, 11, 331, 334, 356, 394
Afrika, 25, 33, 36, 116, 224, 271, 409
Afrika Utara, 248, 249, 331, 339, 340
Agama, 6, 7, 16, 32, 34, 116, 140,
156, 180, 263, 272, 279, 281,
286, 312, 314, 316, 322, 324,
328, 346, 357, 359
Agenda for Democratisation, 37
agenda setting, 11
Agus Wirahadikusumah, 131
Ahmad Bahar, 180, 413
Akbar Tanjung, 27, 136, 137
Aktor, 3, 159, 185, 201, 357, 383,
387, 416
aktor hubungan internasional, 1,
385, 418
akuntabilitas, 47, 160, 187, 216, 226,
412
Al Youm, 256
Alan Kreczko, 129
Al-Aqsa, 191, 278, 286, 299, 304,
310, 315, 322, 327
Al-Baghdadi, 193
Albright, 134
Al-Haram Al-Syarif, 278, 286, 310,
322
aliran modal, 206, 210
Aljazair, 11, 257, 258
Al-Jazeera, 254
Al-Qaeda, 143, 193, 233, 355, 358
Al-Quds, 190
Alutsista, 342
Alwi Shihab, 134
Ambalat, 184
Amerika Latin, 25, 33, 36, 39, 116,
172, 176, 401
Amerika Serikat, 6, 8, 18, 45, 50, 64,
79, 128, 134, 241, 245
Amien Rais, 130
Amnesti Internasional, 398
Ancaman, 10, 28, 33, 36, 135, 139,
140, 145, 171, 200, 204, 217,

- 232, 311, 328, 330, 352, 355,
356, 358
- Aneksasi, 76, 116, 335
- Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), 115, 170, 365
- anggota DPR, 3, 27, 85, 90, 107, 110,
154, 170, 171, 180, 186, 377
- anggota parlemen, 2, 4, 8, 25, 27, 44,
54, 73, 75, 80, 83, 90, 98
- Angkatan Laut, 241, 246
- Angkatan Udara, 246
- Angola, 66, 78, 177
- Anwar Sadat, 252, 253
- Arab Saudi, 183, 233, 249, 290, 292,
326, 331, 339, 340, 342, 346
- Arab Teluk, 339, 341
- arbitrary arrest*, 14
- arena internasional, 168, 394, 418
- Ariel Sharon, 191
- Asian Parliamentary Assembly
(APA), 196, 232, 289, 293, 296,
325, 404
- APA Troika, 179, 278, 292, 297, 344
- APA Troika Mission, 179
- Asia Forum Parliamentarians on
Population and Development
(AFPPD), 175
- Asia-Pacific Economic Cooperation
(APEC), 136, 222
- Asia-Pacific Group (APG), 187, 260,
261, 265
- Asia-Pacific Parliamentarians
Conference on Environment and
Development (APPCED), 175, 177
- Asia first*, 280, 312
- Asia Pacific Group (APG), 187, 242,
265
- Asia Pacific Parliamentary Forum
(APPF), 78, 172, 175, 177, 289,
325, 404
- ASEAN Inter-Parliamentary
Organisation (AIPO), 78, 114,
147, 148, 153, 169, 172, 173,
175, 344, 347, 359, 362, 396,
401, 402
- Asia-Europe Young Parliamentarians
Meeting (AEYPM), 175
- Amerika Serikat (AS), 6, 8, 45, 50,
68, 80, 128, 132, 241
- Association of South East Asia
Nation (ASEAN), 78, 117, 148,
172, 222, 234, 240, 242, 265,
272, 362, 379, 402, 405
- Asia-Europe Parliamentary
Partnership (ASEP), 175
- Asia Pasifik, 60, 65, 66, 68, 172, 237,
271, 292, 326, 367, 372, 404
- Asia Tenggara, 46, 135, 139, 141,
143, 145, 155, 182, 200, 237
- Asian Parliament, 196, 232, 285,
289, 293
- Associated Press (AP), 255
- Atambua, 131
- Aung San Suu Kyi, 182, 222
- Australia, 67, 113, 160, 233, 235,
291, 398, 403
- Background Paper*, 286
- Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN), 130, 138
- Badan Pusat Statistik (BPS), 245
- Baghdadi al-Mahmoudi, 255
- Bahasa, 6, 33, 177, 267, 292, 420
- Bahrain, 249, 343, 346
- Bait Lahiya, 192

- Bali, 145, 174, 220 235
 Bangkok, 162, 174
 Bank Dunia, 144, 176, 206, 413
 bantuan kemanusiaan, 24, 179, 302
 Bashar al-Assad, 223, 233, 356
 Beijing, 49, 69, 99, 240
 Belgrade, 407
 Belo, 113, 114
 Benghazi, 254, 255
 Berlin, 35, 79, 177, 229
 Bern, 121, 188
 Beyida, 255
bicameral system, 147
 bikameral, 1, 292, 386
 bikameralisme lunak, 147
 bilateral, 61, 77, 117, 128, 168, 169, 170, 246, 338, 341, 361, 366, 369, 373, 392, 396, 399, 403
 Bill Clinton, 9, 45, 190
 Biro Hidrografi Internasional, 238
 Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), 108, 114, 195, 231, 359
 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 204, 366
 blokade Israel, 178, 180, 224, 299, 302, 413
 Bosnia-Herzegovina, 7, 9, 14
 Bouteflika, 258
 Boutros-Boutros Ghali, 37, 187, 271, 333
 Brasil, 78, 177
breakfast meeting, 374
 BRIC (Brazil, Rusia, India, China), 214
 Bucharest, 24, 68
 Budaya, 16, 33, 38, 43, 172, 224
 Bundestag, 235
 Burundi, 7, 11, 13, 18
 Cameroon, 18, 65, 91
 Canberra, 67, 122
capital inflow, 210
 CAVR, 158, 164
 Cambodia-Canada Legislative Support Project (CCLSP), 155
 Cekoslowakia, 258
chado, 373
 Cham Ranh, 139
 Chechnya, 11, 358
 Chiang Mai Initiative, 206
 Chili, 37
 China, 19, 46, 133, 172, 206, 209, 214, 216, 290, 336, 343, 403
civil society, 22, 43
civil war, 394
civilization, 35
claimants, 240
clean government, 48
 CNN, 256
 “Code of Conduct” (COC), 242
 Colombia, 26, 87, 89
common enemy, 178
common interest, 350
common legislation, 286, 317
communiqué, 285, 322
complex emergency, 36
conditionalities, 50
confidence building measures, 13, 260
conflict of civilisations, 31
 Copenhagen, 68, 95
crime of humanity, 14
 Cyprus, 64, 71, 123, 343
 Danang, 139
 Dataran Tinggi Golan, 190
 David Napitupulu, 60, 152

- Dean Gooderham Acheson, 384
 Deklarasi Balibo, 79, 112
 delegasi Indonesia, 69, 83, 87, 107,
 108, 156, 173, 216, 278, 281,
 314, 349
 Delegasi Muhibah, 360, 365
 delegasi perempuan, 188
 Delegasi RI (Delri), 176, 413
democratic diplomacy, 5, 391
democratic governance, 231
democratic transition, 261
 demokrasi parlementer, 2, 388
 demokrasi perwakilan, 156, 267,
 269
 demokratisasi, 6, 36, 44, 47, 48, 54,
 135, 142, 160, 261, 266, 281, 313
 Deng Xiao-ping, 239
 dengar pendapat, 76, 164
 Denmark, 68, 95
Der Spiegel, 113, 114
Détente, 259, 342
 determinan, 384
Deterrence, 260
 devolusi kekuasaan, 160, 161
 Dewan Keamanan, 17, 190, 195, 297
 dialog, 8, 31, 32, 34, 40, 56, 129, 156,
 272, 281, 299, 314, 334, 359
 dialog parlemen, 156
 dialog universal, 8, 31
 Dialog Utara-Selatan, 40, 122
"Declaration of the Conduct" (DOC),
 242
 diet, 360, 362
 diktatur komunis, 258
 diplomasi, 2, 4, 76, 113, 116, 169,
 171, 173, 182, 185, 224, 299,
 341, 360
 antar-negara, 259
 budaya, 184, 417
 elite, 182
 formal, 168, 401
 individual, 392, 395
 internasional, 4, 116, 170,
 171, 172, 178, 182, 186,
 326, 363, 387, 390, 391,
 400, 4027, 416
 kapal meriam, 184, 240
 parlemen, 2
 parlementer, 2, 388
 diplomat, 3, 73, 170, 186, 266, 383,
 420
 diplomat karir, 4, 390
 diplomat Kemlu, 170, 187
 diplomat parlemen, 420
diplomatie parlementaire, 2, 388
disaster risk management, 381
 disiplin hubungan internasional, 1,
 385
 distorsi, 34, 45, 99, 280
 diversitas, 43, 315
 Dja'afar Siddiq, 60, 69, 74, 80, 177
 Doha Round, 227
 dokumen, 25, 45, 58, 81, 347
 domestik, 10, 31, 114, 135, 144, 149,
 261, 274, 290, 331, 352, 363
 dominasi, 11, 138, 292, 325
 donatur utama, 36, 37
double standard, 10
 Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
 147, 148, 150, 152, 153, 294, 363
 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 2,
 4, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 69,
 71, 78, 82, 84, 92, 94, 101, 104,
 114, 120, 129, 147, 153, 171,
 174, 176, 192, 199, 203, 224,
 226, 232, 234, 262, 286, 307,

- 321, 324, 349, 360, 364, 374,
377, 383
DPRGR, 71, 82
Drafting Committee, 58, 62, 71
drone, 194
Dubes AS, 128, 130, 134, 248
dukungan politik, 169, 180, 278, 305
dunia Islam, 34, 232, 326
durabel political, 262
dwifungsi, 134
dynamic balance, 172
- Ed Garcia, 157, 165
Edward Snowden, 235
efek domino, 7, 256, 258
efektivitas, 331, 392
Effendy Choirie, 184
eksekusi, 88, 90, 92
eksistensi, 7, 8, 10, 13, 28, 39, 57,
75, 105, 112, 136, 141, 265, 292,
331, 375
ekspor, 132, 133, 215, 245
ekstrimisme global, 279, 311, 328
embargo, 133, 181, 325, 337, 341
embargo ekonomi, 131, 181, 350,
354
emergency supplementary items, 69,
80, 177, 322
energi baru dan terbarukan, 283,
307
energi nuklir, 180, 342
enforce disappearance, 14
Ecuador, 394
Erdogan, 352
Eropa, 26, 70, 78, 80, 112, 121, 135,
176, 204
Eropa Timur, 258
- eskalasi kekerasan, 191, 192, 223,
278, 280, 304, 312, 322, 327
Eslandia, 205, 218
East Timor Action Network (ETAN),
134
etnik, 6, 34, 116, 180
etnis minoritas, 19, 222
Euro, 198, 199, 216
European Commission, 77
ewuh-pakewuh, 182
Executive Council (Excom), 196, 278
expert, 122
- fair election*, 263
fraksi Islamis, 337
fraksi nasionalis, 337
Food and Agriculture Organisation
(FAO), 37, 49
Forum of Asia Pacific
Parliamentarians for Education
(FASPPED), 175
Fatah, 180, 194
Fathi Terbil, 254
Forum for East Asia-Latin
America Cooperation's Young
Parliamentarians Forum
(FEALAC's YPF), 175
Fiji, 28, 377
Filipina, 46, 139, 141, 142, 155, 229,
238, 289, 295, 344
financial regulation, 198
first track diplomacy, 2, 360
fora internasional, 1, 108, 116, 152,
180, 185, 225, 232
fora multilateral, 175, 177, 396
forum global, 172, 407
forum internasional, 11, 120, 172,
188, 295

- forum multilateral, 11, 169, 333, 407
francophone, 120
Fumio Kishida, 368
fundamental ekonomi, 46, 48
fundamentalis, 334, 340
fungsi diplomasi, 387, 389, 419
fungsi representasi, 4, 262, 390
- G-20, 206
General Agreement for Tariff and Trade (GATT), 124
Gaza Strip, 315
Gazeta Wyborcza, 257
Gelombang Ketiga, 258
Gender, 20, 44, 64
gender equality, 263
Geneve Convention, 29
Genocide, 16, 17, 54, 303
genosida, 16, 161, 164, 335
Gerakan Non-Blok (GNB), 66, 69, 116, 194, 408
Glenn MS Yusup, 130
Globalisasi, 6, 8, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 56, 116, 275, 279, 311, 316, 328, 416
Global Parliamentarians Action Against Corruption (GOPAC), 175, 229, 319, 407, 410
good governance, 48, 262
Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), 168, 171, 361, 363, 393, 413
gun boat diplomacy, 184, 240
- Haenggi, 159, 160
Hak Asasi Manusia, 8, 61, 70, 125, 176, 414
hak berdaulat
- HAM ekonomi, 37
HAM perempuan, 23, 55
Hamas, 180, 192, 194
Hari Kemarahan, 255
Hassan Rouhani, 195
Human Development Index (HDI), 412
Hegemoni, 171, 265, 340
Heng Samrin, 166
Henry Dunant Center, 161
Hezbollah, 190, 193, 233
Hidayat Nur Wahid, 181
HIV/AIDS, 231, 264
honest government, 48
Hong Kong, 227, 238
Hongaria, 23, 61, 83
hot spots, 331
House of Commons, 386
House of Lords, 386
House of Representatives, 148, 386
HRC, 31
Hubungan luar negeri, 224, 413
hukuman mati, 71, 82, 89, 92, 98, 223
human rights mission, 27
human rights violations, 9
humanitarian aids, 302
humanitarian laws, 20
humanitarian principle, 31
humaniter, 9, 165
Husni Mubarak, 249, 252
Hussain Bokhari, 281
Hutu, 16
- International Commission of Jurists (ICJ), 124
identitas kultural, 33, 77
ideologi, 7, 44, 139, 144, 163, 272
ideologi modern, 6, 7, 48

- Idris al-Mesmari, 254
illegal fishing, 231
illegal logging, 231
 International Labour Organization (ILO), 124
 International Monetary Fund (IMF), 136, 138, 176, 206, 210, 212, 413
 implikasi globalisasi, 49, 52, 55
 India, 58, 66, 68, 196, 206
 Indonesia, 2, 7, 19, 26, 27, 34, 41, 57, 62, 64, 74, 77, 80, 84, 110, 116, 117, 133, 136, 141, 174
 Indo-Pasifik, 379, 402
 Inggris, 13, 62, 86, 118, 305
 Insiden Santa Cruz, 78
 integrasi, 52, 112, 207, 218, 282
 ekonomi, 275, 307
 kawasan, 285, 305
 nasional, 322
 integritas, 10, 55, 77, 128, 135, 140, 190, 400
 nasional, 48
 teritorial, 10, 17, 378, 397, 399
Interfaith Dialogue, 225, 359
 international humanitarian law, 24
 International Monetary Fund (IMF), 176, 413
 internet, 59, 250, 257
 Inter-Parliamentary Council, 21, 29, 30, 42, 81, 90, 93, 98, 101
 Inter-Parliamentary Union (IPU), 7, 120, 133, 147, 227, 235, 288, 345
 intervensi, 9, 10, 13, 16, 17, 93, 118, 166, 260, 264, 311, 339, 352
 kemanusiaan, 10
 langsung, 38
 militer, 9, 12
 politik, 9
 investasi, 37, 48, 210, 211, 213, 273, 364
 investasi asing, 216, 415
 International Parliamentarians Association for Information Technology (IPAIT), 175, 407
 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), 377
 Inter-Parliamentarians for Social Service (IPSS), 176, 407
 IPU Council, 188, 189
 ISIS, 193, 294, 314
 Islam, 32, 33, 173, 191, 233, 292
 Islamabad Communique, 285, 322
 Ismail Haniyeh, 180, 413
 Israel, 61, 178, 180, 190, 191, 224, 261, 278, 296, 300
 Istanbul, 20, 69, 178
 Itu Aba, 238
 IUU Fishing, 381, 382
 jalur dua, 383, 387, 417
 Jalur Gaza, 61, 179, 180, 192, 295, 301, 413
 jalur satu, 2, 4, 170, 383
 jaringan komunikasi, 113, 146
 jaringan teroris, 143
 Jenderal Shelton, 128, 129
 Jenewa, 58, 63, 96, 117, 124, 236
 Jepang, 33, 46, 50, 132, 136, 140, 291, 295, 326, 360
 Jerman, 19, 32, 33, 79, 98, 118, 133
 Jerusalem, 190, 191, 278, 294
 Jerusalem Timur, 191, 304
 Jordania, 62, 180, 193, 201, 347
 Jorge Sampaio, 116
 Jose de Venecia, 289, 292, 344

- Kairo, 29, 41, 104, 252
Kaisar Akihito, 361, 370
Kampanye, 36, 41, 116, 193, 398
kampanye demokratisasi, 36, 52, 55
kapabilitas, 152, 154, 160, 185, 418, 420
Katharina, Riris, 377, 412
Katsuya Okada, 361, 370
Kaukus Palestina, 179, 415
Kazakhstan, 257, 343
keamanan dunia, 6, 143, 414
keamanan kawasan, 10, 13, 52, 200, 290
kebijakan luar negeri, 30, 45, 153, 220, 225, 402
kecamatan, 39, 47, 63, 71, 79, 177, 296
kedaulatan negara, 8, 10, 397, 401
kehormatan bangsa, 183, 396, 415
Keidanren, 361, 364
Kejahatan perang, 14, 15, 21, 164, 223
kekerasan, 12, 15, 20, 34, 103, 157, 182, 193, 201, 233, 263, 281
sektarian, 233, 355, 356, 358
kekuatan alternative, 233, 326
kekuatan militer, 246, 300
kekuatan nuklir, 290
kelompok minoritas, 8, 13, 18, 35, 223, 357, 414
kemampuan delegasi, 71, 177
kemanusiaan, 15, 20, 24, 31, 302
kemiskinan, 140, 146, 157, 252, 280, 284, 308
kemitraan global, 274, 275
Kemitraan Sejajar, 44
kepentingan, 11, 30, 33, 51, 63, 103, 144, 165, 225, 241
ekonomi negara berkembang, 37
nasional, 61, 68, 75, 169, 185, 187, 213
negara, 186, 227
Kepulauan Paracel, 239
Kepulauan Spratly, 238, 239, 241
kesenjangan sosial, 140, 341
kesetaraan jender, 161, 162
keterbelakangan, 295, 341
Khatami, 32
Kim Dae Jung, 45
kinerja internasional, 226, 399
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), 398
Kebenaran dan Keadilan (KKR), 163
Komite Nasional Papua Barat (KNPB), 398
koalisi anti-AS, 181, 341
Kofi Annan, 9, 53, 145
kohesi sosial, 6, 43, 48
Komisi Eksekutif, 66, 72, 196, 199, 321
Komisi HAM PBB, 76, 82, 130, 194
Komisi Keparlemenan, 67
Komisi Politik, 65, 67, 117, 278, 310
Komisi Rekonsiliasi, 158
Komite Bosnia, 126
Komite Eksekutif, 58, 150, 200
Komite Somalia, 126
Komnas HAM, 102, 103, 130, 406
kompleksitas masalah, 193, 347
komunikasi, 42, 45, 113, 146, 156, 162, 275, 285, 317
komunikasi diplomatik, 4, 390
komunisme, 6, 36, 48, 75, 93
konektivitas, 283, 316
konflik, 8, 9, 12, 15, 31, 33, 44, 48, 52, 76, 113, 127, 156, 161, 176, 193, 195, 201
etnis, 258

- internal, 48, 103, 341
 Korea, 244, 247
 primordial, 15, 34, 140
 regional, 237, 265, 271
 terbuka, 259, 272
 Kongo, 7, 11, 13, 18
 Konferensi Diplomatik PBB, 30
 konferensi internasional, 67, 120,
 121, 124, 126, 186
 konservatisme, 279, 311
 konsolidasi, 165, 174, 202, 223, 226,
 262
 konsolidasi demokratis, 174, 202,
 262, 269, 315, 348, 352
 konstituen, 2, 152, 263, 269, 336
 konstituensi, 42, 399
 Korea Selatan, 45, 101, 133, 243,
 245, 246, 248
 Korea Utara, 65, 71, 87, 243, 245,
 248
 Kosovo, 9, 13, 69
 krisis ekonomi di Asia, 46, 47
 krisis ekonomi global, 204, 205, 210,
 214
 krisis ekonomi Yunani, 211, 212
 krisis keuangan global, 282, 306
 krisis utang Yunani, 208, 211, 215
 Kubah Besi (*Iron Dome*), 193
 Kunjungan kerja, 3, 183, 389, 393,
 416
 Kunjungan luar negeri, 169, 170,
 392, 400
- Lahore Declaration, 286
 Laut China Selatan, 172, 187, 234,
 237, 238, 240, 243, 259, 344
 Laut China Timur, 343, 362, 367
- Less Developed Countries* (LDCs),
 228, 236
 Liberal Democratic Party (LDP), 375
 Libya, 249, 251
 Liga Persahabatan, 361, 374
 Lingkungan, 37, 48, 65, 218, 231
 lingkungan hidup, 61, 66, 125, 280,
 312
 lobi/perundingan/negosiasi, 4, 84,
 107, 155, 162, 166, 177, 240, 385
 Luar negeri, 10, 30, 45, 75, 113, 168,
 181, 221, 225
lucrative, 171, 391
 madani/masyarakat sipil, 22, 155,
 159, 223, 270
 Madeline Albright, 134
 Mahfud MD, 130
 Mahmoud Abbas, 193, 418
 Majelis Parlemen Asia, 196, 232, 289
 Malaysia, 27, 46, 141, 142, 183, 223
 Mancanegara, 120, 183, 223, 389
 Marty Natalegawa, 194, 219, 222,
 247
 Martin Griffiths, 157
 Marzuki Darusman, 71, 74, 174
 masyarakat internasional, 49, 52, 78,
 157, 164, 166, 189
 MC9, 227, 235
 media massa, 47, 93, 170, 255
 mediator, 157, 161
 Megawati Soekarnoputri, 26, 59, 82,
 102, 103, 106, 136, 178
 Melanesia Spearhead Group (MSG),
 398
 Merkel, 235
 Mesir, 50, 97, 179, 201, 249
 Michelle Miller, 160
 Migran, 35, 51, 281, 275

- Mindanao Islamic Liberation Front (MILF), 140
Minoritas, 8, 13, 18, 32, 35, 55, 182, 268
Moammar Khadafi, 254, 255
Mohammed Ali Abdellah, 256
Mohammed Ghannouchi, 249, 250
money laundering, 230, 318
Mozambique, 78, 177
multidimensi, 284, 308
multilateral, 11, 12, 21, 54, 72, 78, 159, 172, 175, 213
multitrack diplomacy, 3, 186, 383
Mursi, 223, 352
Mutual Legal Assistance (MLA), 293
Myanmar, 11, 26, 87, 142
- narkoba, 171, 281, 319
nasionalisme, 6, 8, 19, 48, 135
nation state, 6, 7
National Chapter, 229
Nazarbayev, 257
negara adidaya, 6, 8, 79, 139, 140, 165, 239
negara berkembang, 25, 32, 36, 40, 47, 51, 177, 207, 215
Nejad Hosseinian, 281
nepotisme, 48, 133
Netanyahu, 193
nilai demokrasi, 39, 44, 67
nilai fundamental, 40
Non-Blok, 66, 69
Nouria al-Maliki, 356
nuklir, 70, 180, 290, 326, 341
- Orang Asli Papua (OAP), 401
Barack Obama, 193, 235, 261
- "oil for food"*, 24
Organisasi Konferensi Islam (OKI), 78, 117
Organisasi Papua Merdeka (OPM), 398, 412
Organization of Islamic Conference (OIC), 404
oposisi, 143, 249, 255
Orde Baru, 128, 174, 392
Osama bin Laden, 356
otoriter, 2, 36, 46, 75, 82, 93, 161, 223
- pacted transition*, 259
Paket Bali, 236
Palestina, 61, 178, 179, 181, 190, 192
panggung multilateral, 172, 407
Pantai Gading, 121
Papua, 128, 131, 377
Paris, 41, 68, 95, 101, 122
parlemen, 1, 3, 4, 7, 25, 35, 41, 42, 73, 82, 107, 114, 147, 150, 156, 159, 163, 168, 176, 181, 188, 216, 224, 269, 272, 302, 304, 314
Parlemen Asia, 196, 228, 232, 288, 317, 322, 344, 347
Parlemen Asia Virtual, 286, 323
Parlemen China, 333, 338
Parlemen Eropa, 76, 77, 114, 176, 345
Parlemen Federal, 150
parlemen kawasan, 187
Parlemen Perempuan, 66, 174, 189, 314
Parliamentarians Global Action (PGA), 175, 407

- parliamentary diplomacy*, 61, 260, 265
- parliamentary threshold*, 263
- parliamentary visit*, 93
- pasar global, 46, 207, 215
- pasar internasional, 138, 210
- pasar uang internasional, 46, 37, 212
- Pasifik Selatan, 291, 377, 398, 405, 412
- PBB, 15, 17, 20, 30, 35, 53, 56, 72, 113, 117, 143, 159, 190, 239, 242, 265, 300, 302, 351, 362
- peacekeeping force*, 224
- peacekeeping mission*, 224
- peacemaking*, 223
- pekerja migran, 51, 281, 313
- pelaku diplomasi, 2, 3, 185, 360, 383
- pelanggaran HAM, 26, 28, 30, 31, 54, 61, 73, 75, 77, 80, 129, 130, 176, 223, 253, 295, 298, 300, 406
- pembangunan berkelanjutan, 38, 48, 232
- pembantaian massal, 17, 335
- Pengadilan Kriminal Internasional, 30, 164
- pengayaan uranium, 243, 342
- pengentasan kemiskinan, 228, 284, 308
- penguasa otoriter, 47, 249, 254
- penguasaan teritori, 259
- peran parlemen, 37, 42, 107, 139, 155, 160, 219, 159
- Perang Dingin, 25, 36, 44, 77, 83, 199, 143, 172, 257, 295, 383
- Perang Korea, 243
- perang sipil, 193, 254
- perdagangan orang, 279, 312, 329
- perkembangan global, 278, 309
- perkembangan politik, 139, 223, 352
- Pertemuan Tripartit, 44
- Peter Hill, 165
- Parliamentarians Global Action (PGA), 175, 407
- Piagam PBB, 13, 135, 247
- point of intervention*, 316
- politik luar negeri, 10, 61, 181, 219, 221
- politik pengepungan, 341, 354
- Poltak Partogi Nainggolan, 121, 170, 181, 183, 186
- popular will*, 99
- Poros Maritim, 368
- power bargaining*, 28
- praktik diplomasi, 185, 186, 385, 390
- pre-emptive strike, 260
- pre-negotiation, 4, 391
- Presiden Habibie, 177
- preventive diplomacy, 13, 259, 260
- primordialisme, 6
- proxy war*, 331, 334, 335, 339, 342
- Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I), 73, 108
- radikalisme, 279, 294, 311, 316
- Ramos Horta, 113
- reformasi sektor keamanan, 159, 160, 265
- regime change*, 262
- regionalisme ekonomi, 33
- Resolusi Pyongyang, 16, 17, 54
- Revolusi Beludru, 258
- Revolusi Oranye, 258
- rezim otoriter, 75, 82, 223, 346
- Riris Katharina, 412
- roadmap*, 242, 285, 323

- Rohingya , 181, 415
 Roman Herzog, 33
rule of law, 39, 163
- Sabo Dam, 373
 Sadayuki Sakakibara, 361, 364
 Samuel P. Huntington, 32, 33, 258
 sanksi ekonomi , 24, 131, 341
 Santa Cruz, 78, 177
 Sarwono Kusumaatmadja, 152
 Saudi Arabia, 334, 335
 Southeast Asia Parliamentarians
 Against Corruption (SEAPAC),
 228
second track diplomacy, 360
 sektarian, 195, 233
 Selandia Baru, 291, 398
self-determination, 112, 177
 Semenanjung Korea , 218, 243
 separatisme, 31, 48, 51, 135, 140,
 168, 180, 377
 Simon Patrice Morin, 155, 162
 Soeharto, 41, 55, 128, 135, 137, 178
 Soekarno, 98, 301
soft bicameralism, 147, 148, 152
 solidaritas internasional, 188
 Somalia, 9, 13, 14, 126, 356
 Spanyol, 68, 95, 287
sphere of influence, 338
 Sri Bintang Pamungkas, 26, 59, 98
 stabilitas keamanan , 20, 52, 139,
 202
status quo, 302
 Statuta Internasional, 164
 Statuta Roma, 30
 Stockholm , 66, 92, 122
 Strategi, 49, 58, 68, 107, 165, 211
strategic balance, 172
Strategic Direction, 262
strategic partnership, 371
 Studi banding, 3, 170
 Sudan, 11, 87, 342
 Sukatno, 26, 27, 59, 82, 87, 88, 91
 Sundari Abdurahman, 82
 Sunni, 233, 331, 335, 339
 Suriah, 193, 223
 Susilo Bambang Yudhoyono, 223
sustainable development, 38
Sustainable Development Goals
 (SDGs), 232
 Sutradara Gintings , 155, 157, 161,
 184
 Swedia , 66, 92, 287, 304
 Swiss, 31, 58, 63, 121, 188
 Syiah, 233, 331, 334, 337
 Tadamori Oshima, 360, 361
 Taiwan, 133, 238
 Takeo Fukuda, 371
 Tati Darsoyo, 174
 teknologi informasi , 281, 313
 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) , 183,
 397
 Terorisme, 143, 145, 200, 279, 311
the Arab Spring, 352
 the Chiang Mai Initiative, 206
 Theo Sambuaga, 69, 74, 174
 Timor Timur/Timtim, 30, 59, 61, 66,
 76, 80, 129, 168, 176, 400
 Timur Tengah, 123, 172, 194, 201,
 233, 248, 251, 259, 261, 290,
 294, 302, 304, 322, 330, 332
 Toshihiro Nikai, 361, 371
total diplomacy, 186, 383, 384
 transformasi, 157, 187
 transisi, 141, 146, 248
 transisi demokratis, 155, 160, 248,
 261

- Transparancy Indonesia, 229
Transparency Internasional, 229
Transplacement, 259
triangular , 273, 275
tribalisme, 6, 19
Tripoli , 254, 256
- Uighur, 19
Ukraina, 258
ultra-nasionalis, 400
Uni Eropa, 28, 30, 116, 207, 343
Uni Soviet, 6, 8, 49, 135, 139
United Liberation Movement for
West Papua (ULMWP), 398
UN Peacekeeping Forces, 17
UNCHR , 31
UNCLOS , 243
United Nations Development
Program (UNDP), 155
United Nations High Commission for
Refugees (UNHCR), 37, 124
United Nations Information Service
(UNIC), 124
UNICEF, 31, 37
unikameral , 268, 368
unilateral, 12, 17, 179, 201, 239
- Vanuatu , 377, 398
Venezuela, 171, 394
- wakil fraksi, 188
Washington DC , 64, 137
- World Food Programme (WFP) , 31,
49
- World Health Organazation (WHO),
124
William Cohen , 131
win-win policy, 158
Working Committee, 231, 264
World Bank, 176, 214, 413
World Tourism Organization, 175
World Trade Organization, 144, 175,
220
World Trade Centre (WTC), 143
World Trade Organisation (WTO),
49, 53, 144, 220
- Xanana Gusmao, 78, 113
Xinjiang, 19, 31
- Yaman, 249, 339, 342
Yamazaki Masaaki, 360, 361
Yaounde, 54, 65, 72, 91
Yasuo Fukuda, 361
Yeltzin, 258
Yeonpyeong, 243, 248
Yugoslavia, 7, 11, 14, 49, 135
Yunani, 205, 207, 211, 215
Zine al-Abidine Ben Ali, 249, 250,
252
Zionis, 193
Zionist, 413
zona Euro, 246

TENTANG PENULIS

Poltak Partogi Nainggolan, MA, Dr. phil., Prof. Peneliti Utama dan *research professor* untuk Masalah-Masalah Hubungan Internasional di Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR. Pada tahun 1986 menyelesaikan studi S-1 di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Jurusan Hubungan Internasional, Program Studi Perbandingan Politik. Pada Oktober tahun 1999 menyelesaikan studi pasca-sarjana (S-2) di *Graduate School of Political Science and International Relations* di *The University of Birmingham*, Inggris, bidang *Security Studies*, dengan beasiswa Chevening Scholarship dari Foreign Commonwealth Office (FCO). Pada Februari tahun 2011 menuntaskan program doktoral ilmu politik di *Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg*, Jerman, dengan beasiswa dari Hanns Seidel Stiftung (HSS), dengan tesis *The Indonesian Military Response to Reform during Democratic Transition: A Comparative Analysis of Three Civilian Regimes 1998-2004*. Menulis buku antara lain *Reformasi Struktur Ekonomi RRC Era Deng Xiao-ping*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995; *Ancaman ISIS di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017; *Indonesia dan Rivalitas Cina, Jepang dan India*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018; dan *Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018. Co-penulis dan editor buku *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta, Yayasan API, 2001; serta buku-buku lain, di antaranya, *Indonesia dan Kemitraan Strategis dalam Hubungan Internasional*, Jakarta: Azza Grafika, 2013; *Keamanan Maritim di Kawasan*, Jakarta: Azza Grafika 2014; *Agenda Poros Maritim Dunia dan*

Respons dan Perubahan Lingkungan Strategis, Jakarta: Azza Grafika, 2015; *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017; dan *Proxy War di Timur Tengah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019. Penulis dapat dihubungi di alamat email: pptogin@yahoo.com.